

POLITIK DESENTRALISASI: KONFLIK OTORITAS DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA PADA PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LUMAJANG

ARUAN , NAKKOK

PEMBIMBING : Drs.Priyatmoko,MA

CONFLICT; POLITICAL

KKB KK-2 TP 01 / 11 Aru p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

RINGKASAN

Paradigma baru otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perubahan mendasar dalam politik desentralisasi lama yang sentralistik menjadi politik desentralisasi yang desentralistik. Salah satu implikasi dari politik desentralisasi yang desentralistik dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan IMB dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Namun, kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan IMB dan IUR & HU di Kabupaten Lumajang ini, justru menimbulkan konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Meski konflik otoritas atau kewenangan ini bersifat laten, namun berdampak negatif terhadap kinerja pelayanan perizinan IMB dan IUR & HU oleh kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara *stakeholders* dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB dan IUR & HU, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik otoritas atau kewenangan ini, dan mengeksplorasi upaya-upaya penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan, serta menganalisis dan merumuskan strategi penyelesaian konflik otoritas atau kewenangan sebagai sebuah agenda ke depan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan *key informan* dan informan, yang dipadukan dengan kuesioner semi terbuka dan tertutup, observasi serta analisis dokumen. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa konflik otoritas atau kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan konflik otoritas atau kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan IUR & HU antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang bersumber dan atau terjadi karena ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan interdependensi otoritas atau kewenangan di antara *stakeholders* yang pada gilirannya menjadi sumber terjadinya konflik di antara *stakeholders* tersebut.

Konflik otoritas atau kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan konflik otoritas atau kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan IUR & HU antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang yang bersumber dan atau terjadi dari ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat tersebut kemudian mendorong terjadinya persaingan dan perebutan sumber-sumber daya birokrasi yang berujung konflik, karena para *stakeholders* berupaya mempertahankan otoritas dan kewenangan yang telah dimilikinya dengan merugikan pihak lain. Upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan adalah melalui intervensi Bupati Lumajang, dengan mempertemukan para *stakeholders* dan instansi terkait dalam Tim Pendelegasian Wewenang Kepada Kecamatan guna mencari pemecahan masalah secara komprehensif dan integratif, melalui proses debat dan atau dialog menuju konsensus untuk kemudian dijadikan keputusan dalam bentuk Peraturan Bupati Lumajang. Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan teknik dan substansi debat dan atau dialog menuju konsensus yang perlu ditempuh. Atas dasar konsensus dimaksud, Bupati dapat menginisiasi dilakukannya deregulasi kebijakan dan secara simultan melakukan reorganisasi kecamatan.

SUMMARY

The new paradigm of regional autonomy based on the Act Number 22 of 1999 which then replaced with the Acts Number 32 of 2004 about Regional Government, is the basic transformation in the centralistic old decentralization politics into the decentralist decentralization politics. One of implications of the decentralist decentralization politics in this research context was the delegation of authority policy of the Regent to the Sub-district Head in Lumajang Regency to implement the licensing services of IMB (license to construct building) and the License of Recreation and Public Entertainment Business (IUR & HU). But, the delegation of authority policy of the Regent to the Sub-district Head to implement the licensing services of the IMB and the IUR & HU in this Lumajang Regency, exactly cause authority conflicts between the sub-district and the Public Works Department of Lumajang Regency and between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency. Although this authority conflicts were latent in nature, but they had negative impact to the performance of the IMB and IUR & HU licensing services by sub-district. The objective of this research was to describe how is the occurrence process of authority conflicts between stakeholders in the implementations of licensing services of IMB and IUR & HU, cause factors of these authority conflicts, and explore the settlement efforts have been and being carried out, and analyze and formulate the authority conflict conflicts settlement strategy as an agenda ahead. This research used the descriptive research type with the qualitative approach. Data sources used were both primary data and secondary data by data collection technique by means of in-depth interview with the key informants and informants, integrated to the semi open and close questionnaire, observation and document analysis. From the results of this research, it could be known that the authority conflicts in the implementation of IMB licensing services between the sub-district

and the Public Works Department of Lumajang Regency and the authority conflicts in the implementation of IUR & HU licensing services between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency had sources and or took place due to inexplicitness and inconsistency of the delegation of authority of the policy of delegation of Regent authority to the Sub-district Head, thus it caused the authority overlaps and interdependences among stakeholders that in turn became a source of conflicts occurrence among the stakeholders. The authority conflicts in the implementation of IMB licensing services between the sub-district and the Public Works Department of Lumajang Regency and the authority conflicts in the implementation of IUR & HU licensing between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency having sources and or took place of the inexplicitness and inconsistency of the policy of the delegation of authority of Regent to Sub-district Head and then urged by the competition and struggling of bureaucracy resources ended to the conflicts, due to the stakeholders made serious efforts to retain their authorities they have had by harming other sides. The efforts of conflict settlement have been and being carried out we via the intervention of Lumajang Regent, by uniting the stakeholders and the related instance in the Delegation of Authority To Sub-district Team for seeking the problems solution in comprehensive and integrative manners, by means of debate process and or dialogue toward consensus in order to later it was enacted a decision in the form of Regulation of Lumajang Regency. In this context, this research recommended the debate technique and substance and or dialogue toward consensus need to be covered. On the base of intended consensus, the Regent could initiate the implementation of policy deregulation and simultaneously implemented the sub-district reorganization.

ABSTRAKSI

Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sebagai implementasi desentralisasi melalui skema dekonsentrasi telah menimbulkan konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dan mengeksplorasi upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan, serta menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan konflik sebagai agenda ke depan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, disebabkan oleh dua hal, yakni: ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan, serta persaingan dan atau perebutan sumber-sumber daya birokrasi yang terbatas. Keduanya secara simultan telah mendorong masing-masing *stakeholders* untuk berupaya mempertahankan otoritas atau kewenangannya. Mengingat kompleksitas konflik otoritas atau kewenangan ini, maka diperlukan strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan pemecahan masalah secara komprehensif dan integratif.

Kata Kunci: urusan, kewenangan, sumber-sumber daya, konflik.

ABSTRACT

The policy of delegation of authority of Regent to Sub-district Head in Lumajang Regency to implement the licensing services of the License to Construct Building and the License of Recreation and Public Entertainment Business, as the decentralization implementation via the de-concentration scheme have caused the authority conflicts between the sub-districts and the Public Works Department of Lumajang Regency and between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency. Via the descriptive qualitative approach, this research described how is the process of authority conflicts occurrence between the sub-district and the Public Works Department of Lumajang Regency and between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency, described the cause factors of conflicts occurrence, and explored the conflicts settlement efforts have been and being carried out, and analyzed and formulated the conflicts management strategy as agenda ahead. From the results of this research, it could be known that the authority conflicts occurrence between the sub-district and the Public Works Department of Lumajang Regency and between the sub-district and the Integrated Servicing Office of Lumajang Regency, were caused by two matters, namely: the policy inexplicitness and inconsistency, and competition and or struggling of the limited bureaucracy resources. Both simultaneously have urged each of stakeholders to make serious efforts to retain their authorities. Considering this authority conflicts complexity, then it needed the conflict settlement strategy via the problem solution in comprehensive and integrative manners.

Key Words: affair, authority, resources, conflict.